

KADISDIK SUMBAR BELUM TERIMA LAPORAN, OMBUDSMAN DALAMI KASUS SURAT SAKTI

Selasa, 01 Agustus 2017 - Array

"Surat sakti yang menekan kepsek dalam penerimaan siswa baru itu masuk ke dalam dugaan maladministrasi. Semuanya sedang dalam pendalaman" Adel Wahidi, Asisten Ombudsman Sumbar.

PADANG, HARIANHALUAN.COM – Kasus surat sakti sebagai bentuk intimidasi terhadap kepala SMA dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Bukittinggi sampai di tangan Ombudsman Sumbar. Sejumlah kepala sekolah dipanggil untuk diinterwiew dan keterangan.

Asisten Ombudsman RI Perwakilan Sumbar Adel Wahidi menyebut, ada empat kepala sekolah yang dijadwalkan akan dipanggil.

Mereka adalah Kepala SMAN 2 Bukittinggi, SMAN 3 Bukittinggi, SMAN 4 Bukittinggi dan SMAN 5 Bukittinggi. "Sudah ada surat layangkan surat pemanggilan terhadap empat kepsek yang dipaksa menerima siswa," terang Adel.

Dalam surat bernomor : 0305/SRT/0235.2017/Pdg-03/VII 2017, dijadwalkan empat kepala SMA diminta mendatangi Ombudsman RI Perwakilan Sumbar pada Jumat (14/7) mendatang. "Kami ingin meminta klarifikasi dan penjelasan dari pihak masing-masing sekolah. Ini terkait beredarnya surat sakti yang dikeluhkan oleh masyarakat.. Surat sakti yang menekan kepala sekolah dalam penerimaan siswa baru itu masuk ke dalam dugaan maladministrasi. Semuanya sedang dalam pendalaman," sebut Adel.

Permasalahan seperti ini, terangnya tidak akan terjadi jika semua yang berhubungan dalam proses tersebut mengikuti prosedur dan aturan yang telah ditetapkan. "Proses PPDB mestinya kan sederhana saja. Ada syarat, ketentuan nilai, dan lainnya. Melalui proses ini, tidak bisa diintervensi oleh pihak manapun, apalagi oleh surat sakti, rekomendasi dan seterusnya. Kan sudah ada proses pendaftaran, seleksi, dan pengumumannya. Jika anaknya tidak diterima, ya dengan legowo saja merelakan sang buah hati menempuh pendidikan di tempat yang lain, tanpa terus memaksakan kehendak," ulasnya.

Disdik Sumbar Belum Terima Laporan

Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat, Burhasman Bur mengaku belum menerima laporan terkait adanya intimidasi terhadap kepala sekolah dalam penerimaan siswa baru. Intimidasi itu datang dari sejumlah pejabat dan orang berpengaruh, dengan tujuan agar anak atau kerabatnya bisa diterima bersekolah. "Belum ada laporan masuk, terkait ratusan surat sakti itu," ungkap Burhasman pada Senin (10/7).

Dia mengatakan, dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), baik untuk sekolah yang berada di tingkat kabupaten/kota, maupun yang di daerah, semuanya melalui koordinasi dengan pihak Dinas Pendidikan Sumbar. "Koordinasi tersebut berjalan dengan baik, tapi untuk di Bukittinggi, memang belum ada laporan masuk," ungkapnya.

Burhasman mengatakan, jika siswa yang direkomendasikan memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di sekolah tersebut, maka keputusan diterima atau tidaknya merupakan keputusan mutlak sekolah. "Sudah ada aturan dalam proses penerimaan peserta didik baru. Pihak sekolah tinggal menjalankan berdasarkan prosedur yang ada. Jika ada pihak pejabat yang merekomendasikan, maka wewenang sekolah yang melakukan seleksi, apakah semua siswa tersebut layak atau tidak diterima di sekolahnya.

Berdampak ke Mutu Pendidikan

Pengamat Pendidikan dan Koordinator Kopertis Wilayah X, Herri mengatakan, jika ada unsur subjektif atau campur tangan pihak luar yang dapat mengintimidasi sekolah, maka hal tersebut akan berdampak terhadap mutu dan kualitas pendidikan. "Jika ada unsur kecurangan dalam proses penerimaan siswa baru, hal ini dapat mengakibatkan menurunkan mutu dan kualitas pendidikan. Selain itu, dapat merugikan banyak pihak, salah satunya kesempatan siswa yang seharusnya bersekolah di sekolah yang diinginkannya tidak dapat terwujud," kata Herri.

Herri mengatakan, jika memang ada rekomendasi dari pihak tertentu hal ini harus sesuai dengan kriteria yang diinginkan sekolah. Seperti halnya merekomendasikan siswa yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun non akademik. "Jika siswa yang direkomendasikan sarat dengan berbagai prestasi, maka hal tersebut wajar saja. Apalagi jika direkomendasikan ke sekolah yang memiliki kualitas pendidikan yang bagus. Hal ini dapat mendorong meningkatkan prestasi si anak dan meningkatkan kualitas pendidikan.

pendidikan,” katanya.

Lanjutnya, sekolah seharusnya mampu menjadi jalan penghubung bagi siswa untuk mencapai sukses di masa depan. sekolah harus selektif dan mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Sehingga, mutu pendidikan semakin berkembang dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas.

Sebelumnya, anggota DPRD Sumbar, Ismunandi Sofyan menemukan sejumlah fakta mencengangkan dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tingkat SMA tahun ajaran 2017-2018 di Bukittinggi. Proses PPDB sarat intimidasi terhadap kepala sekolah agar meloloskan siswa tertentu dalam penerimaan. Pelakunya, kebanyakan pejabat daerah yang memiliki pengaruh kuat.

Para pejabat melakukan intimidasi dengan modus membuat memo atau lazim disebut “surat sakti”, agar kepala sekolah menyetujui siswa tertentu. “Ini sangat memiriskan. Proses penerimaan peserta didik yang seharusnya bebas dari segala macam intimidasi malah menjadi ladang intimidasi. Pelakunya kebanyakan pejabat,” terang Komisi III DPRD Sumbar Ismundi Sofyan. Ismunandi Sofyan melakukan peninjauan ke SMA di Bukittinggi, akhir pekan lalu.

Kunjungan lapangan yang dilakukan disamping untuk melihat kondisi sekolah juga untuk mengetahui proses PPDB tahun ajaran 2017-2018. Sekolah yang dikunjungi, yakni SMAN 2 Bukittinggi, SMAN 3, SMAN 4 dan SMAN 5. “Dari kunjungan lapangan yang kami lakukan, hampir semua SMA di Bukittinggi ditemukan katabalece atau surat sakti dari sejumlah pihak yang ditunjukkan kepada kepala sekolah. Tujuannya memaksakan agar siswa tertentu dapat diterima. Surat sakti itu ada yang dikirimkan oleh beberapa orang penting di Bukittinggi bahkan provinsi,” ujar Ismunandi Sofyan.

Dari pengakuan kepala sekolah kata Ismunandi Sofyan, surat sakti yang mereka terima pada tahun ajaran baru, jumlahnya mencapai 100 hingga 150 surat. Melalui surat sakti itu, sejumlah orang penting merekomendasikan sejumlah nama agar diterima. Adanya surat sakti itu, kepala sekolah tidak bisa berbuat apa-apa. Mau tidak mau merekomendasikannya. Sehingga hampir di semua sekolah ada siswa titipan yang masuk menggunakan surat sakti tersebut. “Jumlahnya ratusan,” sebut Syofyan.

Diakui Syofyan, pihaknya juga tidak bisa menampik permainan surat sakti dalam PPDB. Namun jika surat sakti itu mencapai 100-150 surat sakti, katanya sangat disayangkan karena akan mengganggu proses penerimaannya. “Jika surat sakti hanya berkisar 5 -10 orang itu hal yang wajar dalam PPDB dan bisa ditolerir. Namun ini ratusan surat sakti yang dipegang oleh kepala sekolah. Sudah tidak wajar,” terang anggota DPRD Sumbar yang berasal dari daerah pemilihan Bukittinggi - Pariaman tersebut.

Surat sakti itu ada yang berasal dari sejumlah pejabat dan orang-orang penting yang menginginkan siswa yang bersangkutan diterima. Bahkan surat sakti itu ada yang berasal dari luar kota Bukittinggi. “Surat sakti itu tidak hanya berasal dari Bukittinggi, ada yang berasal dari daerah tetangga seperti dari Agam, Pasaman dan Pariaman. Hal inilah yang membuat kami merasa kebingungan, kok sebegitu besarnya intimidasi dalam penerimaan siswa di Bukittinggi,” lanjut Syofyan. (h/mg-adl/mg-eb)

Sumber: